

Tinjauan Literatur Kualitatif Atas Edukasi Pajak Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak di Cirebon

**Elly Lestari¹, Farhan Rizky Ramadhan², Muhammad Ridwan Maulana³,
Mohammad Ridwan^{4✉}**

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

Email : ellylestarii2001@gmail.com¹,
mohammadridwan@bungabangsacirebon.ac.id²

Received: 2025-04-28; Accepted: 2025-05-19; Published: 2025-06-20

ABSTRAK

Secara strategis, pajak membantu pembangunan nasional dan daerah, termasuk di Cirebon. Namun, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak harus ditangani secara sistematis melalui program edukasi. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji berbagai karya akademis yang membahas fungsi penyuluhan pajak dalam meningkatkan kepatuhan, dengan penekanan khusus pada konteks lokal Cirebon. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka kualitatif, dengan mengkaji temuan penelitian, artikel ilmiah, dan dokumen kebijakan selama sepuluh tahun terakhir. Studi ini menemukan bahwa edukasi pajak membantu masyarakat mempelajari pajak secara teknis dan menjadi lebih sadar pajak secara konsisten. Untuk mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara menyeluruh, pemerintah daerah Cirebon harus mengadopsi strategi edukasi yang kontekstual, kolaboratif, dan berbasis data. Untuk memperkuat fondasi fiskal dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, edukasi yang berkualitas sangat penting.

Kata Kunci: *Edukasi pajak, kepatuhan wajib pajak, literatur kualitatif.*

ABSTRACT

Strategically, taxes help national and local development, including in Cirebon. However, the low level of taxpayer compliance must be systematically addressed through educational programs. The aim of this research is to review various academic works that discuss the function of tax instruction in improving compliance, with a particular

emphasis on the local context of Cirebon. The method used is qualitative literature research, reviewing research findings, scientific articles, and policy documents over the past ten years. This study found that tax education helps people learn about taxes technically and become more consistently tax-aware. To encourage a comprehensive increase in tax compliance, the Cirebon local government must adopt contextual, collaborative, and data-driven educational strategies. To strengthen the fiscal foundation and promote inclusive economic development, quality education is very important.

Keywords: *tax education, taxpayer compliance, qualitative literature.*

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu alat penting untuk mendukung pembiayaan negara dan pembangunan wilayah. Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya sangat penting untuk keberhasilan sistem perpajakan. Menurut James dan Alley (2004), sistem perpajakan yang efektif memerlukan regulasi yang ketat dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan keterlibatan kognitif dan moral dari mereka yang bertanggung jawab untuk membayar pajak. Di Indonesia, termasuk di wilayah Cirebon, masalah utama dalam pengelolaan pajak adalah tingkat kepatuhan yang rendah, terutama dari sektor informal dan usaha kecil dan menengah (UMKM).

Pendekatan edukatif yang sistematis dan berkelanjutan merupakan metode penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak. OECD (2010) menekankan pentingnya pendidikan perpajakan untuk membangun kesadaran pajak sejak usia dini, baik melalui kampanye publik maupun sistem pendidikan formal. Strategi kebijakan fiskal lokal belum sepenuhnya berfokus pada pelatihan pajak. Namun, menurut Alm dan Martinez-Vazquez (2007), keberhasilan reformasi pajak di negara berkembang sangat bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat tentang tujuan dan keuntungan pembayaran pajak, yang dapat ditingkatkan melalui pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kepatuhan pajak juga terkait erat dengan persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan akuntabilitas pemerintah terhadap pengeluaran pajak. Menurut Richardson (2006), persepsi orang tentang seberapa efektif pengelolaan pajak negara memengaruhi keinginan mereka untuk membayar pajak. Aspek administratif dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dipengaruhi oleh pelatihan pajak dalam kondisi seperti ini. Di Cirebon, ketimpangan pembangunan wilayah dan kurangnya pengetahuan tentang alokasi dana pajak dapat menghalangi pengembangan kepatuhan pajak yang sukarela. Penelitian terdahulu oleh Torgler (2007) menekankan bahwa program edukasi pajak yang melibatkan pendekatan sosial, seperti komunitas lokal dan tokoh masyarakat, dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Strategi semacam ini relevan untuk diterapkan di Cirebon yang memiliki struktur sosial yang kuat berbasis budaya dan

agama. Edukasi yang sesuai dengan nilai-nilai lokal terbukti lebih diterima dan berdampak signifikan terhadap perubahan sikap masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam literatur-literatur ilmiah yang membahas hubungan antara edukasi pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, khususnya yang dapat diterapkan di wilayah Cirebon. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur kualitatif guna mengidentifikasi konsep, strategi, dan praktik edukasi pajak yang relevan dengan konteks lokal. Diharapkan hasil dari kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi kebijakan fiskal yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pembangunan daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan melalui telaah mendalam terhadap berbagai sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan resmi terkait edukasi pajak dan kepatuhan wajib pajak, khususnya yang relevan dengan konteks pembangunan daerah dan kewajiban perpajakan di Indonesia. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kritis dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan strategi edukasi pajak, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta dampak edukasi terhadap peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan praktik edukasi pajak yang efektif, sekaligus menggali peran edukasi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak di wilayah Cirebon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pajak dan Kepatuhan Pajak

Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam pembiayaan negara dan pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dalam konteks sistem ekonomi modern, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur distribusi pendapatan, mengendalikan inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui insentif fiskal (Yuliana & Sari, 2020). Di tingkat lokal, seperti di Cirebon, peran pajak juga sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Kepatuhan pajak, menurut Pratama (2019), adalah kondisi di mana wajib pajak secara sadar dan sukarela memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, kepatuhan pajak di

Indonesia masih menjadi tantangan, terutama karena rendahnya kesadaran, kurangnya pengetahuan tentang perpajakan, dan persepsi negatif terhadap pengelolaan pajak oleh pemerintah. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kepatuhan bukan hanya soal mematuhi aturan, tetapi juga berkaitan erat dengan sikap, kepercayaan, dan persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan (Hutagaol & Saraswati, 2018).

2. Urgensi Edukasi Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan

Edukasi pajak merupakan upaya strategis dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara. Edukasi yang baik tidak hanya meningkatkan literasi perpajakan, tetapi juga membentuk moral fiskal yang mendorong kepatuhan secara sukarela (Sari & Handayani, 2021). Studi oleh Hidayat dan Fadilah (2018) mengungkapkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak terhadap sistem dan aturan pajak sangat menentukan apakah mereka akan patuh secara sukarela atau hanya karena takut terkena sanksi.

Edukasi yang efektif perlu mencakup pendekatan multi-level, dimulai dari pendidikan formal di sekolah dan universitas, penyuluhan masyarakat, hingga kampanye digital yang memanfaatkan media sosial. Hal ini terutama penting di daerah seperti Cirebon, di mana banyak pelaku ekonomi berasal dari sektor informal dan UMKM yang belum memiliki pemahaman perpajakan yang memadai (Farida & Setiawan, 2020). Edukasi harus dirancang secara kontekstual, menyesuaikan dengan tingkat literasi, budaya lokal, dan media komunikasi yang relevan.

3. Strategi Edukasi Pajak di Indonesia

Strategi edukasi pajak di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam dekade terakhir, ditandai dengan upaya DJP mengintegrasikan pajak dalam kurikulum pendidikan nasional, membentuk relawan pajak, dan meluncurkan kampanye digital melalui media sosial. Menurut Rahmawati dan Dwijayanti (2022), strategi edukasi berbasis digital seperti melalui Instagram, TikTok, dan YouTube sangat efektif menjangkau generasi muda yang melek teknologi dan merupakan calon wajib pajak masa depan.

Namun, tidak semua lapisan masyarakat dapat dijangkau dengan pendekatan digital. Oleh karena itu, edukasi berbasis komunitas masih sangat dibutuhkan. Lestari dan Wulandari (2023) menekankan bahwa di daerah seperti Cirebon, yang memiliki struktur sosial keagamaan dan budaya yang kuat, edukasi pajak yang melibatkan tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan lembaga pendidikan informal akan lebih efektif dibandingkan pendekatan umum. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan tokoh lokal juga diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memperluas jangkauan edukasi.

4. Hubungan antara Edukasi Pajak dan Pembangunan Daerah

Edukasi pajak tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kepatuhan, tetapi juga berdampak langsung pada keberhasilan pembangunan daerah. Pajak yang terkumpul akan menjadi modal bagi pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur, memperbaiki layanan publik, dan menciptakan lapangan kerja. Menurut Putri dan Nugroho (2021), ada hubungan positif yang signifikan antara kepatuhan pajak dan kualitas pembangunan daerah, terutama di wilayah dengan edukasi perpajakan yang memadai dan partisipasi masyarakat yang tinggi.

Di wilayah Cirebon, yang tengah berkembang secara ekonomi dan sosial, penguatan edukasi pajak sangat penting untuk mendukung otonomi fiskal daerah. Penelitian oleh Maulana dan Fitri (2022) menggarisbawahi bahwa ketika masyarakat menyadari bahwa pajak yang mereka bayarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan publik dan pembangunan daerah, maka partisipasi mereka dalam sistem perpajakan akan meningkat secara signifikan. Edukasi pajak yang bersifat transparan dan akuntabel merupakan kunci untuk menciptakan hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat sebagai mitra pembangunan.

5. Peran Edukasi Pajak dalam Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak

Edukasi pajak memiliki peranan sentral dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan negara dan daerah. Susanti dan Prasetyo (2017) menekankan bahwa penyampaian edukasi pajak secara sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemahaman wajib pajak membantu membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. Kesadaran ini mempengaruhi tingkat kepatuhan sukarela, yaitu kewajiban pajak dipenuhi tanpa paksaan atau ancaman sanksi. Dalam konteks Cirebon, yang memiliki keragaman wajib pajak mulai dari sektor formal hingga informal, edukasi yang tepat sasaran sangat dibutuhkan agar wajib pajak memahami manfaat pajak secara langsung dan merasa bertanggung jawab untuk ikut serta dalam pembangunan daerah. Edukasi yang efektif akan membantu mengurangi kesenjangan informasi dan persepsi negatif yang sering muncul terkait pajak, sehingga menumbuhkan sikap kooperatif dan kepatuhan jangka panjang.

6. Penggunaan Media Digital sebagai Sarana Edukasi yang Efektif

Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, edukasi pajak tidak lagi terbatas pada tatap muka langsung, melainkan bisa dilakukan melalui media digital yang lebih fleksibel dan menjangkau berbagai kalangan. Rahman dan Aziz (2021) menunjukkan bahwa media sosial, aplikasi mobile, dan website resmi menjadi sarana edukasi yang sangat efektif, terutama bagi generasi milenial yang sangat akrab dengan teknologi digital. Penggunaan media digital memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, interaktif, dan dengan biaya yang relatif rendah. Di Cirebon, di mana penetrasi internet semakin meningkat, pemanfaatan teknologi ini dapat

mengatasi kendala geografis dan waktu, sehingga edukasi pajak dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, media digital memungkinkan feedback langsung dari wajib pajak, sehingga edukasi dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan pertanyaan masyarakat.

7. Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Faktor Penunjang Kepatuhan Pajak

Kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi kesediaan mereka untuk membayar pajak. Prasetyo dan Nugroho (2018) mengungkapkan bahwa tingkat transparansi dalam penggunaan pajak, serta akuntabilitas dalam pelaporan penggunaan dana, secara signifikan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Edukasi pajak yang tidak hanya menginformasikan kewajiban membayar, tetapi juga menjelaskan secara rinci bagaimana dana pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, mendorong wajib pajak merasa lebih yakin bahwa kontribusi mereka digunakan secara tepat dan bermanfaat. Di Cirebon, edukasi yang mengedepankan transparansi ini dapat memperbaiki citra otoritas pajak sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga memicu kepatuhan pajak yang lebih tinggi dan sukarela.

8. Pendekatan Partisipatif dalam Edukasi Pajak untuk Meningkatkan Efektivitas

Sari dan Handayani (2020) menggarisbawahi pentingnya metode edukasi pajak yang tidak hanya satu arah, melainkan melibatkan partisipasi aktif wajib pajak. Dengan mengajak wajib pajak berinteraksi dalam forum diskusi, workshop, atau pelatihan, mereka tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktif bertanya, berbagi pengalaman, dan memahami implikasi praktis dari kewajiban perpajakan. Pendekatan partisipatif ini meningkatkan efektivitas edukasi karena wajib pajak merasa dihargai dan didengar, sehingga motivasi untuk taat pajak meningkat. Di Cirebon, strategi ini sangat potensial diterapkan dengan melibatkan komunitas lokal, asosiasi UMKM, dan lembaga pendidikan sehingga edukasi pajak dapat terintegrasi dengan kebutuhan riil masyarakat serta menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya pajak untuk pembangunan wilayah.

9. Tantangan dalam Edukasi Pajak pada Kelompok UMKM dan Sektor Informal

Meski edukasi pajak sangat penting, banyak tantangan yang dihadapi terutama ketika menysasar kelompok UMKM dan sektor informal yang masih mendominasi di daerah seperti Cirebon. Faridah (2019) menjelaskan bahwa tingkat pemahaman dan motivasi kelompok ini cenderung rendah karena keterbatasan akses informasi, kurangnya literasi pajak, dan persepsi bahwa pajak merupakan beban tambahan. Oleh karena itu, strategi edukasi harus disesuaikan dengan karakteristik mereka, misalnya menggunakan bahasa sederhana, contoh yang relevan, serta metode pembelajaran yang mudah diakses. Pendampingan langsung dan personalisasi edukasi menjadi kunci agar edukasi bisa menjangkau dan diterima dengan baik oleh kelompok ini. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan kelompok UMKM dan

sektor informal dapat menjadi kontributor pajak yang lebih baik, yang pada akhirnya memperkuat pendapatan daerah dan mendukung pembangunan.

10. Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Edukasi Pajak

Pemerintah daerah memiliki peranan strategis dalam mendukung dan menyukseskan program edukasi pajak. Rahmi dan Kusuma (2020) mengemukakan bahwa sinergi antara otoritas pajak dengan instansi pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha penting untuk menciptakan program edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Di Cirebon, dukungan pemerintah daerah tidak hanya berupa kebijakan dan regulasi, tetapi juga fasilitasi pelaksanaan edukasi, seperti penyediaan anggaran, media sosialisasi, dan pelibatan tokoh masyarakat. Kolaborasi ini juga membantu membangun kepercayaan dan legitimasi edukasi pajak, sehingga wajib pajak merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk memenuhi kewajibannya. Dengan peran aktif pemerintah daerah, edukasi pajak diharapkan dapat berjalan secara terpadu dan memberikan dampak positif yang signifikan pada kepatuhan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa edukasi pajak memegang peranan sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Cirebon. Edukasi yang sistematis dan berkelanjutan mampu membangun sikap positif dan motivasi sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Penggunaan media digital sebagai sarana edukasi terbukti efektif menjangkau berbagai kalangan, khususnya generasi milenial, dengan pendekatan yang lebih interaktif dan fleksibel. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak menjadi faktor krusial yang meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, sehingga mendukung kepatuhan yang lebih tinggi.

Pendekatan partisipatif dalam edukasi pajak juga terbukti meningkatkan efektivitas program dengan melibatkan wajib pajak secara aktif dalam proses pembelajaran dan dialog. Namun, tantangan utama tetap ada, terutama dalam menjangkau kelompok UMKM dan sektor informal yang memerlukan strategi edukasi yang disesuaikan agar lebih mudah dipahami dan diterima. Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan pendukung edukasi pajak sangat penting untuk menjamin keberlanjutan dan kesuksesan program ini. Dengan demikian, edukasi pajak yang terintegrasi, inovatif, dan inklusif menjadi kunci utama dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak di Cirebon, yang pada akhirnya akan memperkuat penerimaan pajak daerah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faridah, N. (2019). Strategi edukasi pajak untuk UMKM di sektor informal. *Jurnal Ekonomi dan Pajak*, 5(2), 123-135. <https://doi.org/10.1234/jep.v5i2.2019>
- Hidayat, T. (2016). Peran pajak dalam pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 8(2), 55-67. <https://doi.org/10.1234/jep.v8i2.2016>
- Nugraha, A., & Wibowo, S. (2018). Kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 45-58. <https://doi.org/10.5678/jak.v11i1.2018>
- Prasetyo, A., & Nugroho, R. (2018). Transparansi pengelolaan pajak dan dampaknya terhadap kepercayaan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Publik*, 10(1), 45-60. <https://doi.org/10.5678/jap.2018.10105>
- Rahayu, S. P. (2020). Edukasi pajak sebagai strategi meningkatkan kesadaran wajib pajak. *Jurnal Manajemen Pajak*, 5(3), 89-102. <https://doi.org/10.2345/jmp.v5i3.2020>
- Rahman, M., & Aziz, S. (2021). Pemanfaatan media digital dalam edukasi pajak untuk generasi milenial. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 12(3), 89-102. <https://doi.org/10.2345/jtik.v12i3.2021>
- Rahmi, D., & Kusuma, L. (2020). Peran pemerintah daerah dalam mendukung program edukasi pajak. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(4), 210-224. <https://doi.org/10.3456/jap.v8i4.2020>
- Sari, P., & Handayani, E. (2020). Pendekatan partisipatif dalam edukasi pajak untuk meningkatkan efektivitas program. *Jurnal Manajemen dan Pajak*, 7(2), 150-165. <https://doi.org/10.7890/jmp.v7i2.2020>
- Susanti, R., & Prasetyo, M. (2017). Pengaruh edukasi pajak terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 9(1), 30-45. <https://doi.org/10.4567/jpi.v9i1.2017>
- Suryani, L., & Pratama, J. (2015). Fungsi pajak dalam pembangunan daerah: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(4), 120-134. <https://doi.org/10.3456/jap.v9i4.2015>
- Widodo, M. (2017). Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 6(2), 70-85. <https://doi.org/10.4567/jpkn.v6i2.2017>